**DAFTAR PUSTAKA**

Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2016). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2016.

Beligat.Com, 2018. Kades Banpres Diduga Korupsi, Mefta Joni,
 ([Http://Www.Beligat.Com/2018/01/11/Kades-Banpres-Diduga-Korupsi-
 Mefta-Joni-Terima-Kasih/](http://Www.Beligat.Com/2018/01/11/Kades-Banpres-Diduga-Korupsi-%20%20%20%20%20%20%20Mefta-Joni-Terima-Kasih/), Diakses Tanggal 06 Maret 2018).

Chrystiana, Ema Tietien. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Duta.Co. 2018. Akuntabilitas Keuangan Desa Kunci Kades Tidak Terjerat Korupsi, ([Https://Duta.Co/Akuntabilitas-Keuangan-Desa-Kunci-Kades-Tidak-Terjerat-Korupsi/](https://duta.co/akuntabilitas-keuangan-desa-kunci-kades-tidak-terjerat-korupsi/), Diakses Tanggal 06 Maret 2018)

Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, *3*(1), 121–137. Retrieved From

Kementerian Keuangan Ri. 2017. Manfaat Bijak Dana Desa. ([Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Artikel-Dan-Opini/Manfaat-Bijak-Dana-Desa/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/manfaat-bijak-dana-desa/), Diakses Tanggal 06 Maret 2018).

Priyatno, Dwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan Spss 20.* Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sekertariat Negara. Indonesia.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekertariat Negara. Indonesia.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekertariat Negara. Indonesia.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sekertariat Negara. Indonesia.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Sekertariat Negara. Indonesia.

Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205–210. Retrieved From.

Sumatera Ekspres, 2018. 20 Kades Diperiksa Terkait Dugaan Pungli Lpj, ([Http://Sumeks.Co.Id/20-Kades-Diperiksa-Terkait-Dugaan-Pungli-Lpj/](http://sumeks.co.id/20-kades-diperiksa-terkait-dugaan-pungli-lpj/), Diakses Tanggal 06 Maret 2018).

Sugiyono, 2006, *Metoda Penelitian Bisnis*, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.

Tribun Sumsel, 2017. Belum Ada Satu Pun Desa Di Mura Serahkan Spj Dana Desa, ([Http://Sumsel.Tribunnews.Com/2017/01/03/Belum-Ada-Satu-Pun-Desa-Di-Mura-Serahkan-Spj-Dana-Desa](http://sumsel.tribunnews.com/2017/01/03/belum-ada-satu-pun-desa-di-mura-serahkan-spj-dana-desa), Diakses Tanggal 06 Maret 2018).

 Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang .